

IMPLIKASI KEWENANGAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN
DI PROVINSI GORONTALO SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-
UNDANG NO 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Mengikuti Ujian Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum**

Oleh:

DEDY H. SIKILI

NIM 271414141



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERIGORONTALO

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**IMPLIKASI KEWENAGAN PENGELOLAAN USAHA
PERTAMBANGAN DI PROVINSI GORONTALO SETELAH
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO 9 TAHUN 2015 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

Oleh


Nama : Dedy H. Sikili


Nim : 271 414 141

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

PEMBIMBING I

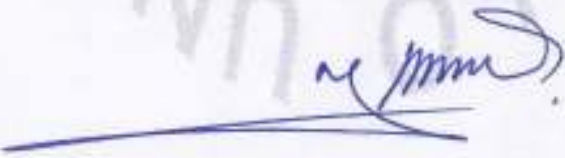
PEMBIMBING II


Prof. Dr. Johan Jasin SH., M.Hum
NIP 195406251981021001


Zamroni Abdussamad SH., MH
NIP 197007122003121002

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Hukum


Suwitno Y. Imran SH. MH
NIP 198306222009121004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

IMPLIKASI KEWENAGAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN
DI PROVINSI GORONTALO SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-
UNDANG NO 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH

Oleh
Dedy H. Sikili
NIM. 271 414 141

Telah diperbaiki berdasarkan saran penguji:
Kamis 15 Maret 2018

1. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, S.H., M.Hum
NIP. 19680409199303 2 001

()

2. Hj. Nirwan Junus, S.H., M.H.
NIP. 1969060220000 2 001

()

3. Prof. Dr. Johan Jasin, S.H., M.Hum
NIP. 19540625198102 1 001

()

4. Zamroni Abdussamad, S.H., M.H.
NIP. 19700712200312 1 002


()

MENGETAHUI

DEKAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO


Mohammad Rusdianto U. Puluhulawa, S.H., M.Hum.
NIP. 197001105 199703 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang disusun dalam memenuhi salah satu persyaratan menempuh ujian akhir di Universitas Negeri Gorontalo dengan "IMPLIKASI KEWENANGAN PENGELOLAAN USHA PERTAMBANGAN DI PROVINSI GORONTALO SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTHAN DAERAH".

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai norma, kaidah, etika penulisan dan buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya diri sendiri atau terdapat *plagiat* dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gorontalo, April 2018

Yang membuat pernyataan


DEDY D. SIKILI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Tak ada kata menyerah untuk meraih suatu impian
(Dedy)*

Kupersembahkan karya ini sebagai wujud pengabdianku kepada : Almarhum papaku tercinta (judin sikili) yang semasa hidupnya beliau selalu memberikan dorongan dan bimbingan kepada peneliti dengan penuh kasih sayang, serta almarhumah mamaku tersayang yang bersama dengan papaku tidak dapat menyaksikan keberhasilanku

Kakakku tersayang dan suaminya (Desrita sikili dan Eris tahir)

Sepupuku yang tersayang (Karim toiti, Vicka Sikili, Vicky Silkili, Andy Radju, Vito Sikili)

Serta keluargaku yang selalu meberikan motivasi, bimbingan, dan selalu menanti keberhasilan studiku

ALMAMATERKU TERCINTA

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

TEMPAT AKU MENIMBA ILMU

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT karena izin dan kuasanya peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, sehingga melalui kesempatan ini peneliti memohonkan maaf yang sebesar-besarnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti senantiasa dihadapkan dengan berbagai kesulitan, namun berkat kesabaran serta kerja keras, maka semua kesulitan dapat terlewati. Peneliti menyadari bahwa semua kesulitan dalam terlewati berkat pertolongan dan petunjuk yang maha kuasa Allah SWT dan juga melalui bantuan semua pihak terutama dosen pembimbing, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Untuk itu dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan penghargaan yang sedalam-dalamnya serta ucapan terima kasih yang tiada batasnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr Syamsu Qamar Badu, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
2. Bapak Prof. Dr. Ir Mahludin H Baruwadi, M.P selaku Wakil Rektor I Universitas Negeri Gorontalo.
3. Bapak Nani, SE, M.Si selaku Wakil Rektor II Universitas Negeri Gorontalo.
4. Bapak Dr. Fence M Wantu, SH, MH selaku Wakil Rektor III Universitas Negeri Gorontalo.

5. Bapak Prof. Dr. Hasanuddin Fatsah, M.Hum selaku Wakil Rektor IV Universitas Negeri Gorontalo.
6. Bapak Moh. Rusdiyanto Puluhulawa, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
7. Bapak Zamroni Abdussamad, SH, MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
8. Ibu Lisnawati W Badu, SH, MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
9. Bapak Weny A Dunga, SH, MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
10. Bapak Suwitno Y Imran, SH, MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
11. Bapak Prof. Dr. Johan Jasin, SH, M.Hum selaku Dosen penasehat akademik sekaligus dosen pembimbing I.
12. Bapak Zamroni Abdussamad, SH, MH selaku dosen pembimbing II.
13. Seluruh staf dosen dan pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
14. Kaka kandung bersama suaninya (Desrita Sikili dan Eris Tahir)
15. Rekan-rekan mahasiswa angkatan 2011 antara lain : Yudin kau, Nur Djuwa, Tufiq Saidi, Ishak Dai,
16. Rekan-rekan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Program Pengembangan Masyarakat (KKN-PPM) Desa Lamu Kecamatan Batudaa Pantai Tahun 2017

17. Teman special yang selalu bersama peneliti dan selalu memberikan motivasi, bantuan dan semangat sehingga selesainya skripsi (Sri julian Monalisa Amuntu)

Akhirnya semoga bantuan dan bimbingan serta petunjuk yang telah diberikan oleh berbagai pihak akan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan Insya Allah kita semua senantiasa masih tetap dalam Rahmat, Taufiq dan hidayahnya. Amin ya rabbal Alamin.

Gorontalo, 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRAK	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Implikasi	10
B. Teori Kewenangan	12

C. Pemerintahan Daerah	15
D. Pertambangan	21
E. Kerangka Pikir	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	27
B. Jenis Data dan Bahan Hukum	27
C. Teknik Pengumpulan Data atau Bahan Hukum	28
D. Lokasi Penelitian.....	29
E. Responden, Informan dan Narasumber.....	29
F. Teknik Pengolahan Data	29
G. Analisis Data	30

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
B. Kewenangan Pengelolaan Usah Pertambangan Di Provinsi Gorontalo Setelah Berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	35
C. Implikasi Kewenangan Pengelolaan Usah Pertambangan Setelah Berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	67

BAB IV PEMBAHASAN

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Iup explorasi kabupaten gorontalo -----	58
Tabel 2. Iup explorasi kabupaten bone bolango -----	58
Tabel 3. Iup explorasi kabupaten pohuwato -----	59
Tabel 4. Iup explorasi kabupaten gorontalo utara -----	59
Tabel 5. Ipr explorasi kabupaten gorontalo -----	59
Tabel 6. Iup operasi produksi kabupaten gorontalo utatara-----	60
Tabel 7. Iup operasi produksi kabupaten pohuwato-----	61
Tabel 8. Iup operasi produksi kabupaten gorontalo -----	61
Tabel 9. Iup operasi produksi kabupaten gorontalo utatara-----	61
Tabel 10. Iup operasi produksi kabupaten boalemo-----	62
Tabel 11. Iup operasi produksi kabupaten bone bolango-----	62

ABSTRAK

Dedy H. Sikili, 2018 : Impikasi Kewenangan pengelolaan Usaha Pertambangan Di Provinsi Gorontalo Setelah Berlakunya Undang-Undang No 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pembimbing I prof. Dr. Johan Jasin SH, M.Hum, Pembimbing II Zamroni Abdussamad, SH, MH.

Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengisruhan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan bisnis, konstruksi, penambang, pengelola dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Pertambangan menjadi faktor pendorong pesatnya perkembangan daerah Gorontalo, yang saat ini sudah menjadi daerah dengan putaran perekonomian pesat, bagaimana tidak akan hal ini, suatu daerah mampu mebudidayakan hasil sumber daya alam untuk mendorong sebagai penopang kehidupan masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mencari tahu bagaimana kewenangan pengelolaan usaha pertambangan di Provinsi Gorontalo setelah berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan untuk mengetahui apa implikasi kewenangan pengelolaan usaha pertambangan di provinsi Gorontalo setelah berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu hukum khususnya peningkatan hubungan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan hukum tata negara pada umumnya .

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum sosio yuridis (sosial legal research) dengan menggunakan pendekatan yuridis normative karena tujuan inti dalam penelitian ini yakni ingin menggambarkan bagaimana kewenangan pengelolaan usaha pertambangan di Provinsi Gorontalo setelah berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan apa implikasinya, maka dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data berupa, wawancara serta observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya kewenangan pengelolaan usaha pertambangan di provinsi Gorontalo setelah berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah hal ini berimplikasi pada adanya perubahan kewenangan yang ada di daerah dalam hal kewenangan perizinan dan pengawasan di daerah. Dimana pada rezim Undang-Undang Pemerintah Daerah yang lama masi menjadi kewenangan kabupaten/kota namun setelah berlakunya Undang-Undang Pemerintahn Daerah baru kewenangan atas pemberian izin dan pengawasan bukan lagi menjadi kewenangan kabupaten/kota namun mejadi kewenangan pemerintah provinsi, dan akan banyak terjadinya penambang tanpa izin (PETI). kerusakan lingkungan tidak terpantau, penerimaan sektor bukan pajak pada daerah kabupaten kota akan menurun, timpang tindih aturan antara undang-undang Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan peraturan tingkat daerah kabupaten/kota ditinjau ulang bahkan dicabut.

Kata Kunci : Implikasi,kewenangan,Pengelolaan, pertambangan

